



LAPORAN TAHUNAN PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN BUMD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatNya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat khususnya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan 2023 ini sesuai dengan yang direncanakan. Laporan Tahunan Pemantauan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disadari dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala usul saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada bagian, sub bagian beserta staf yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun kita. Terima Kasih.

Kupang, 29 Desember 2023


PLT. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NTT,
Drs. ALEXANDER B. KOROH, MPM
PEMBINA TK.I
NIP 197004271990031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tujuan dan Saran	2
1.1.2 Tujuan	2
1.1.2 Saran.....	2
1.1.3 Dasar Pelaksanaan	2
1.1.4 Hasil Yang Diharapkan.....	2
Bab II Pelaksanaan	3
2.1 Waktu dan Tempat	3
2.2 Narasumber.....	3
2.3 Peserta.....	3
2.4 Pembiayaan	3
Bab III Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD	
3.1 Rapat Pembinaan dan Evaluasi yang Pertama	4
3.1.1 Pembukaan	4
3.1.2 Pemaparan Materi.....	4
3.1.3 Diskusi dan Tanya Jawab.....	7
3.2 Rapat Pembinaan dan Evaluasi yang Pertama	9
3.2.1 Pembukaan	9
3.2.2 Pemaparan Materi.....	9
3.2.3 Diskusi dan Tanya Jawab.....	14
3.3 Rapat Pembinaan dan Evaluasi yang Pertama	15
3.3.1 Pembukaan	15
3.3.2 Pemaparan Materi.....	15
3.3.3 Diskusi dan Tanya Jawab.....	20
Bab IV Hasil Yang Dicapai	22
4.1 hasil rapat pertama.....	22
4.2 hasil rapat kedua	23
4.3 Hasil rapat ketiga.....	24
Bab V Penutup	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didasarkan pada Undang-Undang dan peraturanakan lebih mudah bagi BUMD menghadapi era industri 4.0,” Regulasi BUMD diatur dalam UU 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab. XII dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dengan landasan hukum ini BUMD berpeluang memperluas pasar, kemudahan mengakses informasi global dan efisiensi. BUMD harus bertransformasi dalam menghadapi perubahan secara global untuk menjadi kekuatan di daerah. Sinergitas antar badan dan lembaga lainnya juga menjadi bagian penting di era industri 4.0 perusahaan BUMD dapat memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga penting dalam percepatan pembangunan perekonomian daerah dan juga tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan berupa deviden dari Badan Usaha Daerah (BUMD) sehingga dibutuhkan berbagai kebijakan yang dapat mendorong terwujudnya peran BUMD, hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah sebagai pemegang otoritas dan *regulator* ekonomi. Pemerintah berkewajiban mengatur berbagai hal yang terkait dengan regulasi dibidang ekonomi yang menjadi acuan bagi semua stakeholder termasuk BUMD untuk mengelola potensi daerah melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang didukung dengan kelembagaan yang berdaya saing dan perencanaan yang terarah sebagai pemberi arah pembangunan ekonomi serta dilandasi dengan cara berpikir global dan bertindak local (*Thing Globaly and Action Localy*) disesuaikan dengan potensi dan peluang ekonomi, sosial budaya daerah. BUMD juga merupakan bagian dari organ pemda, maka pada era Otonomi Daerah selain memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing, juga memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi-potensi bisnis yang ada didaerah.

Seiring dengan semangat otonomi, BUMD-BUMD baru pun bermunculan. Namun tidak sedikit dari BUMD yang didirikan itu, hanya sekedar pajangan. Dari sisi kelembagaan pengelolaan BUMD dituntut harus profesional mempunyai pengalaman dan wawasan *entrepreneur*. Keberhasilan BUMD diukur berdasarkan kinerja dan memakai ukuran/prinsip manajemen keuangan yang sehat. Sehingga Direksi perlu membuat kontrak manajemen sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Persoalan yang tengah dihadapi BUMD terkait dengan rendahnya kinerja dan daya saing, mengatasi persoalan ini maka Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam hal ini Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan, kemitraan BUMD, investasi daerah, perencanaan, evaluasi BUMD dan pengembangan kelembagaan BUMD.

1.2 Permasalahan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tapi pada kenyataannya bahwa BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru lebih banyak suntikan dana dari Pemerintah Daerah dari pada keuntungan yang didapat. Kondisi ini menjadi beban bagi APBD sehingga apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah yang belum tercapai dengan optimal.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka perlu dilakukan Evaluasi, Pembinaan dan pemantauan terhadap perkembangan kinerja, perkembangan bisnis serta berbagai persoalan dan kendala yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga usaha meningkatkan kinerja BUMD ke arah yang lebih baik dapat tercapai, yang juga merupakan tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai pembina BUMD.

1.3 Dasar

- Surat Tugas dari Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PAP.090/938/PAP2.1 tanggal 14 Desember 2023 atas nama
 1. Theresia B. Taluma, ST
 2. Maria Imelda Surya, SE
 3. Delila A.L.P.Saefatoe
 4. Godlif Manus
- Surat Tugas dari Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 090/935/PAP2.1 tanggal 12 Desember 2023 atas nama
 1. Patrisia A.D. Wea, SE
 3. Jeanette Dessy Deborah Thei, S.Pt
 4. Agnes G. Rotuludji, S.Sos
 5. Josevina Erlyn Hoinbala
 6. Yohanita Uto Kabelan, SE
- Surat Tugas dari Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PAP.090/936/PAP2.1 tanggal 13 Desember 2023 atas nama
 1. Drs. Alexander B. Koroh, MPM
 2. Meryana, S.Sos
 3. Maria Imelda Surya, SE
 4. Lingkan R. Tanan, S.Kom
 5. David Bunga

- Damianus Lede Surat Tugas dari Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PAP.090/937/PAP2.1 tanggal 13 Desember 2023 atas nama
1. Patrisia A.D. Wea, SE
 2. Paulus Histo Safrodan, SH.,M.H.
 3. Jonias Ressi, S.M
 4. Meysiliani Sidi Bata, S.Kom
 5. David Bunga

1.4 Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemantauan pada 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi NTT

1. PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (PT. BPD NTT)
2. PT. Penjamin Kredit Daerah NTT (PT. Jamkrida NTT)
3. PT. Flobamor
4. PT. Kawasan Industri Bolok (PT. KIB)

1.5 Waktu dan tempat pelaksanaan

Waktu pelaksanaan mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023; Bertempat dimasing - masing BUMD (PT. BPD NTT, PT. Jamkrida, PT. Flobamor dan PT. KI Bolok).

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Melakukan tatap muka dan pembahasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek organisasi dan manajemen
2. Aspek Keuangan dan Permodalan
3. Aspek Rencana Bisnis
4. Permasalahan yang dihadapi BUMD dan rencana tindak lanjut

2.2 HASIL PEMANTAUAN

Hasil pemantauan terhadap 4 BUMD Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

2.2.1 PT. BPD NTT

Dari Hasil tatap muka dan koordinasi dengan Direksi Teknologi Informasi dan Operasional diperoleh:

1. Kredit Mikro Merdeka

Dalam membantu meringankan pelaku UMKM mengembangkan usahanya, PT BPD NTT memberikan kredit merdeka dengan bunga 0 persen, diharapkan agar pengguna kredit memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik, demipertumbuhan usaha yang positif. Adapun realisasi sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Jenis Kredit	Plafond (Rp)	Outstanding	JML Debitur
Kredit Mikro Merdeka			
TJPS	13,499,617,500	9,400,396,406	1745
NON TJPS	29,030,850,000	18,031,387,042	4283
Total	42,530,467,500	27,431,783,448	6,028

- Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PT BPD NTT sebagai pemberi kredit dengan perincian sebagai berikut:
 - Monitoring kredit Mikro Merdeka **Non TJPS** dilakukan secara mingguan
 - Kredit Mikro Merdeka **Khusus Program TJPS**, Pemantauan dan monitoring dilakukan secara harian termasuk penagihan terhadap kewajiban debitur.
- *Offtaker* Program TJPS
Dalam menyukseskan Program Pemerintah Provinsi NTT, Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), Pemerintah bersama dengan PT BPD NTT membangun kemitraan dengan perusahaan lain untuk menjadi *offtaker* dimana fungsinya untuk menyiapkan benih, pupuk, herbisida, pestisida serta pemasaran hasil. Adapun *Offaker* yang telah menjalin kemitraan dengan PT BPD NTT sebagai berikut:

NO	OFFTAKER	WILAYAH KERJA
1	CV ROBINSON	SUMBA BARAT DAYA
2	PT SUAKA BUMI PERTIWI	LEMBATA
3	PT ARTALI JAYA NUSANTARA	TIMOR TENGAH UTARA, TIMOR TENGAH SELATAN, KUPANG DAN ROTE NDAO
4	CV. MONTE CRISTO	BELU DAN MALAKA
5	CV. BIDADARI PERMAI	MANGGARAI BARAT, MANGGARAI, MANGGARAI TIMUR, NAGEKEO, ENDE DAN FLORES.
6	CV BAHTERA LAJU	SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH DAN SUMBA BARAT.
7	CV. ERLANGGA AGRO JAYA	NGADA, SIKKA DAN ALOR

2. Aplikasi – aplikasi yang digunakan di PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dan perbaikan pelanggan kepada masyarakat antara lain:

a. Aplikasi B ' PUNG PETANI adalah aplikasi yang dibuat antara BPD NTT dan Pemerintah Daerah yang akan menghubungkan antara petani, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan dalam mendukung produksi pangan.

Manfaat Aplikasi B'PUNG PETANI sebagai berikut:

- Untuk mengoptimalkan pemetaan produksi dan distribusi komoditas pertanian di NTT;
- Mampu menjaga kesimbangan antara permintaan dan harga pangan, meningkatkan nilai tukar petani, meningkatkan PDRB serta menjaga kestabilan harga;
- Bagi stake holder lainya dan OPD, manfaat aplikasi B'PUNG Petani guna mendapatkan data valid pelaku usaha, data informasi aktivitas pertanian, pengendalian kebijakan , tumbuhnya industry baru dan penentuan kebijakan pemberian modal bagi petani.

b. B JuBisa

Adalah agen perorangan /badan hukum yang dapat menyelenggarakan layanan transaksi Perbankan sesuai PJOK, dimana agen tersebut diberikan aplikasi dan mesin EDC oleh Bank NTT untuk dapat memberikan layanan perbankan. Fasilitas : Transfer internal/eksternal . Tarik/setor tunai, pembayaran (tagihan PDAM, sekolah Mppb, dll), pembelian (pulsa, token) , purchase = pembayaran non tunai atas pembelian barang;

c. Smart EDC Merchant

Adalah fasilitas mesin EDC yang diberikan Bank kepada toko /swalayan /usaha untuk dapat melayani transaksi non tunai (*purchase* = pembayaran non tunai atas pembelian barang GPN, QRIS dan kartu kredit);

d. B Pung Mobile

Aplikasi Mobile Banking Bank NTT menggunakan Hand Phone untuk layanan perbankan, fitur : transfer, pembelian, pembayaran, penarikan tanpa kartu, pengajuan pinjaman (digital loan);

e. QRIS

Adalah layanan pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menggunakan QR Code, untuk transaksi non tunai. Layanan QRIS Bank NTT terdapat pada Merchant (QRIS Static), mesin EDC (QRIS Dinamis);

3. Menjelang Hari Raya Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, PT BPD NTT melaksanakan beberapa kegiatan antara lain Program pengendalian stunting dengan pemberian makanan tambahan kepada anak kurang gizi di wilayah NTT. Pagu anggaran yang digunakan dalam program ini, setiap kantor cabang Bank NTT di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sekitar Rp.50.000.000, tetapi ada Kabupaten/Kota yang sebagian anggarannya sudah terpakai, sehingga pagu anggarannya berkurang.

2.2.2 PT. Jamkrida

- Berdasarkan hasil penilaian dari Irjen Kemendagri RI atas nama PT. Jamkrida masuk dalam kategori BUMD yang **Sehat**, setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik (KAP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi NTT;
- Rencana untuk audiens dengan Bapak Pj. Gubernur direncanakan sebelum RUPS dilaksanakan, belum terealisasi sampai saat karena belum ada nya waktu dari Bapak Pj. Gubernur sehingga perlu dijadwal ulang;
- Penjaminan terhadap nasabah dengan traget sejumlah 5 M, sampai dengan awal desember 2023 sudah mencapai 99.09%. Dan sebagai salah satu BUMD yang juga melakukan peran bagi pengembangan UMKM sampai awal desember terdapat 62.617 pelaku UMKM produktif yang mendapat fasilitas jaminan usaha pinjaman kredit oleh perbankan maupun dalam jaminan kegiatan proyek.
- Kontribusi kepada Pemerintah Daerah NTT dari tahun ketahun mengalami kenaikan Tahun 2020 sebesar **4.538.945.168**; Tahun 2021 sebesar **6.096.535.593**; dan Tahun 2022 sebesar **24.138.917.893**
- Realisasi RKAP tahun 2023
Setelah audit akan dibuat laporan keuangan sesuai permintaan dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
Masa Jabatan Direksi sudah berakhir sehingga perlu mulai dilakukan Fit and Proper Test.

2.2.3 PT. Flobamor

- Kapal
Kapal Ile Boleng masih dalam keadaan rusak harus dikembalikan kepada Kementrian Perhubungan untuk diperbaiki setelah itu dikembalikan lagi ke PT. Flobamor, kendala yang dihadapi adalah dokumen pengembalian ke kementerian perhubungan hilang.
Kapal Feri yang masih beroperasi 2 (dua) armada rencana akan naik dock akan siap beroperasi pada bulan Maret tahun 2022.

- Jagung
Bisnis jagung agak tersendat, kendala yang dihadapi berkaitan dengan program Pemerintah yakni TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi) selama ini yang terlibat di dalam pelaksanaan program TJPS adalah pihak swasta.
- Harapan, diharapkan melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat memfasilitasi PT. Flobamor sebagai BUMD untuk masuk dan terlibat di dalam program TJPS.
 - Lahan TJPS 10% dapat dikelola oleh PT. Flobamor sehingga di dalam pengelolaan bisa dari hulu sampai hilir.
 - Pembibitan sapi dapat bekerja sama dengan PT. Pupuk Kaltim.
- Aspal dan Pengeras Jalan belum berjalan optimal.
Diharapkan melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat memfasilitasi kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar kontraktor dapat menggunakan aspal dan pengeras jalan yang disediakan oleh PT. Flobamor.

2.2.4 PT. Kawasan Industri Bolok

- PT. Kawasan Industri Bolok didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan bergerak dibidang penyewaan lahan milik Pemerintah Provinsi NTT akan tetapi hingga saat ini PT. Kawasan Industri Bolok belum memberikan Deviden terhadap Pemerintah Provinsi NTT. Kendala yang dihadapi PT. Kawasan Industri Bolok yaitu pada status kepemilikan lahan sehingga menyulitkan investor yang dalam melakukan penyewaan lahan terhadap PT. Kawasan Industri Bolok;
- PT. Kawasan Industri Bolok memiliki kendala investor dalam penyewaan lahan PT. Kawasan Industri Bolok pada Perusahaan yang bergerak dibidang smelter yang terkendala pengurusan perijinan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat;
- PT. Kawasan Industri Bolok berupaya mengembangkan *core busines* dengan bekerjasama dengan Perusahaan yang bergerak dibidang perikanan dan mengalami kendala keterbatasan informasi yang dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Permendagri 118 tahun 2018 dan hasil temuan BPK maka Laporan Keuangan akan diserahkan ke Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan oleh BUMD setelah proses audit keuangan selesai;
2. Pengiriman sapi dan volume permintaan sapi meningkat sampai dengan Maret 2022 hingga 1500 ekor ke PD Dharma Jaya DKI Jakarta;
3. PT Flobamor akan mengirimkan daging sapi mentah mengalami kendala akibat penyakit mulut dan kuku pada sapi;
4. Kendala di Investor dalam kerja sama sewa lahan dengan PT. KIB terkait status lahan; Pembentukan tim pemetaan lahan masih dalam proses oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah;

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah memiliki target kinerja diukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimana Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sebagai pembina BUMD, apabila kinerja BUMD baik maka penilaian terhadap satuan kerja juga baik;
2. Sesuai dengan Permendagri 118 tahun 2018, BUMD harus mengirimkan laporan secara berkala baik itu laporan triwulan, semester maupun tahunan, berdasarkan temuan administrasi oleh BPK, BUMD Provinsi NTT belum rutin mengirimkan laporan sebagai bahan evaluasi oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai pembina BUMD.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pemantauan BUMD pada Sub Bagian BUMD Tahun Anggaran 2023, dan kiranya dengan dilakukan Pemantauan secara berkala maka diharapkan pengelolaan BUMD dapat dilakukan secara profesional sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik, mengarahkan dan mengendalikan BUMD agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeselimbangan dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja BUMD dalam menghasilkan laba/profit perusahaan sehingga dapat berkontribusi terhadap PAD.

Kupang, 29 Desember 2023

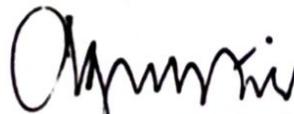
Mengetahui

Pt. Kepala Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT,



Dr. Alexander B. Koroh, MPM
Pembina Tk. I
NIP 197004271990031005

Penanggung Jawab Kegiatan
Koordinator Substansi
BUMD dan BLUD



Patrisia A.D Wea, SE
Pembina Tingkat I
NIP 196508081993032011